



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja – PD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- (2) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu
BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	:	Penutup

- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Renja – PD Tahun 2023 terdiri dari Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- b. Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- h. Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Blitar;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- w. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- aa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- bb. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; dan
- dd. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama

DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2023

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 2, bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju ;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, dan Hasil Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup ;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 ;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2023, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
5. Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang RKPD tahun 2023;
27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud & Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2023.
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan.
- 3) Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- 5) Menyusun perencanaan perencanaan yang mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.
- 6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA DLH tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

BAB III. Tujuan dan Sasaran DLH

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, tujuan & sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar serta daftar Program, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang program dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2024.

BAB V. Penutup

Berisi catatan penting, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun lalu (2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Pengelolaan Persampahan

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kota Blitar

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Urusan Lingkungan Hidup																	
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	48.332.538.848							78,5	6.636.640.108	78,5	6.636.640.108	97,52%	13,73%		
2	1	0	2.0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	223.946.000							100%	35.568.000	100%	35.568.000	100,00 %	15,88%		
2	1	0	2.0	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	6 jenis	62.600.000							5 jenis	10.020.000	5 jenis	10.020.000	83,33%	16,01%		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022						
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	1	0	2.0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	1 jenis	161.346.000							1 jenis	25.548.000	1 jenis	25.548.000	100,00 %	15,83%		
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	43.460.435,765							100%	5.917.480.957	100%	5.917.480.957	100,00 %	13,62%		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	59 orang	43.379.236.665							59 orang	5.912.981.757	59 orang	5.912.981.757	100,00 %	13,63%		
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	3 dokumen	81.199.100							3 dokumen	4.499.200	3 dokumen	4.499.200	100,00 %	5,54%		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	391.394.200									100%	58.502.100	100%	58.502.100	100,00 %	14,95%
2	1	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	4 jenis	391.394.200									1 jenis	58.502.100	1 jenis	58.502.100	25,00%	14,95%
						Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event												5 event		5 event	100,00 %
2	1	0	2.0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	2.602.011.000									100%	388.719.100	100%	388.719.100	100,00 %	14,94%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis	44.455.000									9 jenis	5.477.500	9 jenis	5.477.500	69,23%	12,32%

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022								
																			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)												
1						2					3					4		5		6		7		8=7/6%		9						10				11=10/4			
																K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp	
2	1	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia					4 jenis		122.000.000										3 jenis		31.981.300		3 jenis		31.981.300		75,00%		26,21%	
2	1	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia					4 jenis		59.486.200										2 jenis		7.743.100		2 jenis		7.743.100		50,00%		13,02%	
2	1	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia					57 jenis		666.262.400										54 jenis		109.381.200		54 jenis		109.381.200		94,74%		16,42%	
2	1	1	0	2.0	0						Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia					1.250 dos/ kotak												1.095 dos/ kotak				1.095 dos/ kotak		87,60%					
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia					14 jenis		106.963.400										14 jenis		17.412.900		14 jenis		17.412.900		100,00 %		16,28%	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Jumlah lembar penggandaan	12.300 lembar									12.391 lembar		12.391 lembar		100,74 %		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	42.852.000								3 jenis	6.726.000	3 jenis	6.726.000	100,00 %	15,70%	
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rapat	1.507.880.000								45 rapat	209.998.400	45 rapat	209.998.400	100,00 %	13,93%	
2	1	0	2.0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	412.199.183								100%	65.599.351	100%	65.599.351	100,00 %	15,91%	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	3 rekening	412.199.183								3 rekening	65.599.351	3 rekening	65.599.351	100,00 %	15,91%	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%	9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2	1	0	2.0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	1.142.552.700								100%	170.770.600	100%	170.770.600	100,00 %	14,95%
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	42 kendaraan	763.509.400								36 kendaraan	110.148.900	36 kendaraan	110.148.900	85,71%	14,43%
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	3 unit									3 unit		3 unit		100,00 %	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	182.673.600								4 jenis	28.856.600	4 jenis	28.856.600	100,00 %	15,80%
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	196.369.700								2 jenis	31.765.100	2 jenis	31.765.100	66,67%	16,18%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9				10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	1	0			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	1.152.422.300							100%	245.787.500	100%	245.787.500	100,00 %	21,33%				
2	1	0	2.0		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1 dokumen	902.775.500							1 dokumen	245.787.500	1 dokumen	245.787.500	100,00 %	27,23%				
2	1	0	2.0	0	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	0	902.775.500							1 dokumen	245.787.500	1 dokumen	245.787.500		27,23%				
						Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	1 dokumen								1 dokumen		1 dokumen		100,00 %					

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022						
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9			10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	58%	5.911.272.471									54%	416.953.120	54%	416.953.120	93,10%	7,05%	
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	15,15%	6.998.653.654									6,37%	881.039.807	6,37%	881.039.807	42,05%	12,59%	
						Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%										100%		100%		100,00 %		
2	1	0	2.0		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3 aksi	5.911.272.471									3 aksi	416.953.120	3 aksi	416.953.120	100,00 %	7,05%	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026					Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021								Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1					2					3					4		5		6		7		8=7/6%		9				10		11=10/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022						
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9			10		11=10/4	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	4 unit										4 unit		4 unit		100,00 %		
		Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	3 unit										3 unit		3 unit		100,00 %		
		Jumlah lokasi uji kualitas udara	10 lokasi										10 lokasi		10 lokasi		100,00 %		
2	103	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	2 kali	18.698.653,654						2 kali	881.039.807	2 kali	881.039.807	100,00 %	4,71%	
		Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	3 aksi										3 aksi		3 aksi		100,00 %		
		Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	180 orang										180 orang		180 orang		100,00 %		
		Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	4 aksi										4 aksi		4 aksi		100,00 %		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026					Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022											
																																					Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1					2					3					4					5					6				7				8=7/6%				9				10				11=10/4			
															K		Rp			K	Rp				K	Rp				K	Rp				K	Rp				K	Rp				K	Rp		
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota					16,28%		45.657.250.199													16,27%		6.021.447.600		16,27%		6.021.447.600		99,94%		13,19%												
2	1	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah taman kota yang terkelola					18 taman		45.657.250.199													14 taman		6.021.447.600		14 taman		6.021.447.600		77,78%		13,19%												
2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara					4 jenis		33.513.624.999													4 jenis		2.750.450.000		4 jenis		2.750.450.000		100,00 %		8,21%												
						Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia					1 jenis															1 jenis				1 jenis				100,00 %														
2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia					7 jenis		12.143.625.200													7 jenis		3.270.997.600		7 jenis		3.270.997.600		100,00 %		26,94%												

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara	7 jenis									7 jenis		7 jenis		100,00 %			
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	215.684.600								100%	180.689.100	100%	180.689.100	100,00 %	83,77%		
2	1	0	2.0		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	55 usaha/kegiatan	215.684.600								35 usaha/kegiatan	180.689.100	35 usaha/kegiatan	180.689.100	63,64%	83,77%		
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina	75 usaha/kegiatan	215.684.600								70 usaha/kegiatan	20.689.100	70 usaha/kegiatan	20.689.100	93,33%	9,59%		

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022							
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9				10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65%	1.166.556.600								64%	143.567.900	64%	143.567.900	98,46%	12,31%			
2	1	0	2.0		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60 usaha	1.166.552.600								60 usaha	143.567.900	60 usaha	143.567.900	100,00 %	12,31%			
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	2 jenis	306.804.800								2 jenis	33.796.600	2 jenis	33.796.600	100,00 %	11,02%			
						Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	1 kali									1 kali		1 kali		100,00 %				

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022						
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9			10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	2.0	0	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	1 jenis	859,747,800								1 jenis	109,771,300	1 jenis	109,771,300	100,00 %	12,77%		
						Jumlah peserta bintek penataan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan	200 orang									200 orang		200 orang		100,00 %			
						Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	1 jenis									1 jenis		1 jenis		100,00 %			
						Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	60 usaha									60 usaha		60 usaha		100,00 %			
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	3.466.332.600								100%	587.347.900	100%	587.347.900	100,00 %	16,94%		

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
																																Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1						2					3					4				5		6		7		8=7/6%		9				10				11=10/4	
																K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	2.0			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	3.466.332.600									21 kelompok	587.347.900	21 kelompok	587.347.900	100,00 %	16,94%														
2	1	0	2.0	0		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	2 jenis	2.225.958.000									2 jenis	389.388.100	2 jenis	389.388.100	100,00 %	17,49%														
							Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	5 jenis										5 jenis		5 jenis		100,00 %															
2	1	0	2.0	0		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Fasilitasi Gerdu Kasih	21 lokasi	1.240.374.600									21 lokasi	197.959.800	21 lokasi	197.959.800	100,00 %	15,96%														
							Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	7 jenis										7 jenis		7 jenis		100,00 %															

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022							
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9				10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	1 kali									1 kali		1 kali		100,00 %				
2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	57,14%	2.863.969.450								44,44%	383.600.700	44,44%	383.600.700	77,77%	13,39%			
						Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	30,58%									21,84%		21,84%		71,42%				
						Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali									1 kali		1 kali		100,00 %				
2	1	0	2.0		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	21 predikat	2.820.495.750								14 predikat	383.600.700	14 predikat	383.600.700	66,67%	13,60%			

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
										6		7		8=7/6%				9		10		11=10/4
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9		10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	71 predikat										51 predikat		51 predikat		71,83%	
2	1	0	2.0	0	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri	36 kelurahan	2.820.495.750									28 kelurahan	383.600.700	28 kelurahan	383.600.700	77,78%	13,60%
						Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	126 sekolah										90 sekolah		90 sekolah		71,43%	
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	220.000.000									100%	19.997.400	100%	19.997.400	100,00 %	9,09%

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9			10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2	1	1	2.0		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2 kasus/aduan	219.997.400									2 kasus/aduan	19.997.400	2 kasus/aduan	19.997.400	100,00 %	9,09%	
2	1	1	2.0	0	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	2 kasus/aduan	219.997.400									2 kasus/aduan	19.997.400	2 kasus/aduan	19.997.400	100,00 %	9,09%	
						Jumlah sosialisasi/pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	2 kali										2 kali		2 kali		100,00 %		
2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,18%	119.438.368.336									83%	19.661.033.260	83%	19.661.033.260	99,78%	16,46%	

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8=7/6%		9			10		11=10/4	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
						Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,82%									11%		11%		74,22%			
2	11	11	2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	23.109,62 ton	19.438.368.036								22.508,66 ton	19.661.033.260	22.508,66 ton	19.661.033.260	97,40%	16,46%		
						Volume sampah yang berkurang	4.542,92 ton									3.113,19 ton		3.113,19 ton		68,53%			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara	8 jenis	115.213.953.036								8 jenis	18.949.565.760	8 jenis	18.949.565.760	100,00 %	16,45%		
						Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	7 jenis									7 jenis		7 jenis		100,00 %			
						Jumlah lokasi kerja yang terlayani	25 lokasi									25 lokasi		25 lokasi		100,00 %			

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)					Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022							
																																Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022				Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
																						1						2					3					4	
																K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		K		Rp		K	Rp		
2	1	1	2.0	1	0	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)					3 kelompok		4.224.415.000										3 kelompok		711.467.500		3 kelompok		711.467.500		100,00 %		16,84%	
											Jumlah lomba (bank sampah)					1 jenis												1 jenis				1 jenis				100,00 %			
											Jumlah peserta pembinaan					400 orang												400 orang				400 orang				100,00 %			
											Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia					8 jenis												8 jenis				8 jenis				100,00 %			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas lingkungan hidup Kota Blitar telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2021. Capaian Kinerja Utama selama Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam

Indikator :

- a. Indeks pencemaran air

Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari uji badan air yang dilakukan di 19 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari titik lokasi tersebut, didapatkan data bahwa 7 titik memenuhi baku mutu, 11 titik mengalami pencemaran ringan, sedangkan 5 titik mengalami pencemaran sedang.

2. Indeks pencemaran udara

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara diambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Pencemaran Udara.

3. Indeks tutupan vegetasi

Indeks tutupan vegetasi merupakan perhitungan dari luas RTH publik dan luas RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Indeks tutupan vegetasi dihitung dari luas RTH total di Kota Blitar, baik RTH publik maupun RTH privat. Berdasarkan hasil Kajian Identifikasi RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 luas RTH total adalah 1.139,44 Ha yang terdiri dari RTH publik 529,92 Ha dan RTH privat adalah 609,52 Ha.

4. Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO₂ eq)

Nilai emisi gas rumah kaca dihitung menggunakan aplikasi online SIGNSMART dari Kemen LHK. Adapun yang dimasukkan dalam hitungan adalah emisi GRK dari sektor transportasi yaitu penggunaan BBM, sektor pertanian yaitu penggunaan pupuk dan dari sektor limbah terdiri dari pengolahan limbah padat yaitu pengolahan sampah dan limbah cair yaitu pengolahan limbah cair domestik di tingkat rumah tangga.

5. Persentase mata air yang berfungsi

Definisi mata air yang berfungsi adalah mata air yang telah terkonservasi secara baik sehingga debit air dapat mengalir dan berfungsi bagi masyarakat sekitar. Fungsi mata air untuk irigasi, sumber air bersih dan lain – lain. Jumlah total mata air di seluruh Kota Blitar adalah 51 lokasi sedangkan jumlah mata air yang berfungsi adalah 50 lokasi.

6. Predikat Pengelolaan Lingkungan

Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:

- ✓ Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota
- ✓ Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap.

Pada tahun 2020 tidak terdapat penilaian Adipura dikarenakan pandemi covid-19.

2. Kinerja Utama : Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah

Indikator :

a. Persentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal

IPAL komunal rumah tangga sampai dengan tahun 2020 sejumlah 78 unit. IPAL tersebut di kelola oleh masing – masing kelompok swadaya masyarakat. KSM tersebut memiliki pengurus selaku koordinator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun keberlangsungan operasional IPAL. Masyarakat biasanya membayar iuran secara rutin untuk digunakan apabila ada kendala atau

kerusakan di instalasi dan jaringan IPAL. Rumah tangga yang terlayani IPAL komunal atau yang memiliki saluran rumah ke IPAL komunal rumah tangga adalah 3.348 KK, sedangkan jumlah rumah tangga total adalah 51.926 KK.

b. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan

Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum di imbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah penurunan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah pengolahan sampah dari berbagai aspek

Sampah yang terolah di TPA	=	20.672,51	ton / tahun
Sampah yang dikelola (sekolah, ponpes,tempat ibadah, rumah makan/restoran, fasilitas umum, hotel, dll	=	8,05	ton / tahun

Capaian layanan persampahan perkotaan dihitung dari volume sampah yang terolah di TPA dan volume sampah yang terolah di masyarakat antara lain di TPS 3 R, pengomposan skala rumah tangga, sektor daur ulang lapak dan melalui bank sampah sejumlah 25.069,04 ton/tahun. Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2020 sejumlah 27.219,69 ton/tahun.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

NO	Indikator *)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra DLH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(13)	(14)	(17)
1	Indeks Kualitas Air				59,92	61,72	63,52					
2	Indeks Kualitas Udara				84,53	85,48	86,43					
3	Indeks Kualitas Lahan				55,23	55,73	56,23					
4	Persentase capaian layanan persampahan				93	94	95					
5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3				67	72	72					
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A	A	A					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi lahan untuk ruang terbuka hijau mulai menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- ✓ Penambahan penduduk disertai dengan penambahan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan penduduk turut berperan penting dalam kenaikan nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya sebagai upaya pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga TPA cepat penuh.
- ✓ Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Kurangnya dukungan Aparatur yang mempunyai standart kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas – tugas teknis.
- ✓ Proses pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup masih belum berjalan dengan optimal

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ✓ Penegakan hukum terhadap aturan lingkungan masih belum optimal ;
- ✓ Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan belum optimal ;

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh ;
- ✓ Kerusakan lingkungan telah menjadi isu nasional yang global dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat ;
- ✓ Anggaran pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat tiap tahun ;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu–isu strategis dimaksud antara lain :

1. Peningkatan volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk
2. Lahan pertanian semakin berkurang
3. Terbatasnya lahan taman kota dan RTH publik
4. Belum tertatanya kawasan sempadan sungai
5. Terjadinya pencemaran sungai oleh limbah domestik dan limbah industri
6. Pemanasan global

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam melaksanakan pengolahan sampah dari rumah tangga
2. Sosialisasi dan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi sebagai pencemar
3. Pembangunan taman melalui pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai
4. Melaksanakan aksi mitigasi Rencana Aksi Daerah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 indeks	7,007,842,812	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 Indeks	7,426,244,761	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	44,871,539	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 persen	49,871,539	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	9,828,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	9,828,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	35,043,539	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	40,043,539	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	5,819,548,776	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	6,172,423,568	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	5,815,199,226	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	6,168,074,018	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	3 laporan	4,349,550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4,349,550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SKPD								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	116,294,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	106,279,100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 paket	77,850,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	68,100,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 orang	38,444,200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	38,179,100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	368,376,969	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	369,893,769	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,720,299	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,720,299	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	51,109,453	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	51,109,453	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	6,446,318	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6,446,318	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 paket	62,286,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	63,772,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	25,135,999	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,167,299	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	3 dokumen	7,680,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	36 dokumen	7,680,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan		Perundang-Undangan yang Disediakan					Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	209,998,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	209,998,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	89,537,905	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	132,455,737	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	14,369,563	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	14,369,563	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	48,820,717	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	118,086,174	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	26,347,625						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 persen	330,798,151	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 persen	330,798,151	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	65,598,151	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	65,598,151	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	265,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	265,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 persen	238,415,272	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 persen	264,522,897	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	39 Unit	131,149,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	39 Unit	131,149,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	5,760,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	5,520,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	48,983,300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	48,983,300	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2,522,472	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	425 Unit	28,870,097	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	253,622,471	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	405,141,904	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan	1 dokumen	253,622,471	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1 dokumen	147,717,821	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	253,622,471	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	147,717,821	
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun	2 dokumen	257,424,083	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	257,424,083	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq) Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	7 persen 55 persen 100 persen	1,015,019,169	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ eq) Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	7 persen 55 persen 100 persen	824,210,967	
	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	3 aksi 3 kali 18 titik	1,015,019,169	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	3 aksi 3 kali 18 titik	824,210,967	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	408,921,521	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	382,841,521	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	606,097,648	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	441,369,446	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27 persen	2,733,315,266	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27 persen	2,471,388,917	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH Publik yang dikelola	ha	2,733,315,266	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas RTH Publik yang dikelola	420.34 Ha	2,471,388,917	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	13 Unit	2,733,315,266	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	13 Unit	2,471,388,917	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen	64,008,612	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen	13,968,612	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	40 usaha/ kegiatan	64,008,612	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	40 usaha kegiatan	13,968,612	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah	1 Dokumen	64,008,612	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka	1 Dokumen	13,968,612	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			Penimbunan		Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64 persen	192,214,694	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64 persen	192,214,694	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	60 usaha	192,214,694	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60 usaha	192,214,694	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	12 Dokumen	69,403,663	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang	12 Dokumen	69,403,663	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Diberikan			
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	122,811,031	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	122,811,031	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	648,543,104	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	404,964,499	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	648,543,104	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	404,964,499	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14 Lembaga	389,346,242	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14 Lembaga	281,038,762	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	259,196,862	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	123,925,737	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase kelurahan berseri Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	1 kali 47,62 persen 24,03 persen	383,585,190	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura) Persentase kelurahan berseri Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	1 kali 47,62 persen 24,03 persen	383,545,190	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	56 predikat 16 predikat	383,585,190	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	56 predikat 16 predikat	383,545,190	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	383,585,190	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	383,545,190	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	16,540,856	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	16,540,856	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2 kasus/aduan	16,540,856	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2 kasus/aduan	16,540,856	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	1 Dokumen	16,540,856	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	1 Dokumen	16,540,856	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pening
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani			PPLH Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	83,10 persen 11.89 persen	11,918,978,045	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah tertangani Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	83,10 persen 11,89 persen	11,345,602,260	
	Pengelolaan Sampah		Volume sampah tertangani Volume sampah yang berkurang	22666.52 ton 3386.95 ton	11,918,978,045	Pengelolaan Sampah		Volume sampah tertangani Volume sampah yang berkurang	22666.52 ton 3386.95 ton	11,345,602,260	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	7,291,360	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	7,291,360	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	26053.47 Ton	6,659,328,000	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	26053.47 ton	6,659,328,000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	26053.47 Ton	6,659,328,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	494,873,186	
	Peningkatan Peran		Jumlah Masyarakat,	3	793,365,410	Penyediaan Sarana		Jumlah Sarana dan	11 Unit	4,184,109,71	

[illegible]

2.5. Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2023 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel 2.5 dokumen RENJA ini.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar

N o	Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
1	Pemasangan Biopori Jumbo dan Sumur Resapan	Bongares	Pemasangan Biopori Jumbo dan Sumur Resapan	25 Biopori Jumbo dan 1 Sumur Resapan	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Taman Turi)	Jl. Turi Selatan , RT.01 RW.IV (Lapangan Turi), Kel Turi	Pembangunan Taman Turi	100 x 2 m ²	
2	Pembangunan Taman Tlumpu Paradise	Jl. Klampis RT 1 RW 2, Kel Tlumpu	Pembangunan Taman Tlumpu Paradise	1 paket	
3	Pembangunan Taman Ekologi	RT.02/RW.02 Kel Tanjungsari	Pembangunan Taman Ekologi	1 paket	
4	Pembangunan Talud Makam Umum	RW 3, Jl.Sultan ageng tirtoyoso, Kel. Tanggung	Pembangunan Talud Makam Umum	60 x 3 m	
	Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				
1	Pelatihan Aplikasi Bank Sampah	Bank Sampah Orbit	Pelatihan Aplikasi Bank Sampah		
	Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Jalan Akses ke TPS Gedog	TPS Gedog	Pembangunan Jalan Akses ke TPS Gedog		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

- A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas. Sesuai tugas pokok dan fungsi DLH pada prioritas 6, yaitu “Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim”.

Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional yang sesuai dengan tupoksi DLH adalah

- a. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

- b. Perencanaan pembangunan rendah karbon

Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka mencapai prioritas infrastruktur dasar dan konektivitas: aktivitas sanitasi layak infrastruktur dasar dan konektivitas dengan tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal, maka hal-hal yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPALD;

2) Sampah: pengelolaan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. permukiman layak dan pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan Bidang Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung prioritas nasional ke-enam yaitu membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pelestarian lingkungan dilakukan dengan upaya penanganan Emisi Gas Rumah Kaca Penanganan Perubahan Iklim serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penanganan perubahan iklim baik kegiatan *mitigasi* yang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 26 persen, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.

Kemudian untuk menjaga kualitas lingkungan maka perlu dilakukan upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5 pada tahun 2021 yang di dukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan diperlukan upaya implementasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan dan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Menindaklanjuti hal ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah:

1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 6,37 persen pada tahun 2022, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
2. Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
3. Perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan *World Meteorological Organization/WMO*) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
4. Perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
5. Perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
6. Perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
7. Metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
8. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
9. Upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;
10. Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;
11. Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
13. Perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

3.2. Tujuan & Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DLH tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2023	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatnya kualitas air	1	Indeks kualitas air	Nilai Indeks kualitas air (kalkulator)	61,72	1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah badan air yang memenuhi baku mutu / jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%	82,5
2	Meningkatnya kualitas udara	2	Indeks kualitas udara	Nilai Indeks kualitas udara (kalkulator)	85,48	2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	(Jumlah kawasan yang memenuhi baku mutu / Jumlah kawasan yang ditetapkan) x 100%	100
3	Meningkatnya kualitas lahan	3	Indeks kualitas lahan	Nilai Indeks kualitas lahan (kalkulator)	55,73	3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	3	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	100
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	4	Persentase capaian layanan persampahan	(Jumlah volume sampah terolah/jumlah total timbulan sampah x 100%)	94	4	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	4	Persentase sampah terkelola	(Jumlah volume sampah terkelola / Jumlah timbulan sampah dalam satu tahun) x 100%	94,99

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2023	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2023	
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	(Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat/Jumlah total pelaku usaha penghasil limbah B3) x 100%)	72	5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik / Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang ditetapkan) x 100%	72,50
5	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	6	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selain itu penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021
pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Perlu adanya gerakan pengurangan sampah yang masuk ke TPA dengan optimalisasi gerakan 3 R (Reduce, Reuse , Recycle). Upaya yang dilakukan antara lain : optimalisasi peran bank sampah, peningkatan composting masyarakat, optimalisasi TPST, pelatihan daur ulang sampah	Secara berkala Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang Pengelolaan Persampahan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku pengolah sampah dari sumbernya. Selain diadakannya sosialisasi, juga diadakan lomba bank sampah setiap tahunnya.	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	Mengoptimalkan pemantauan	Optimalisasi Aplikasi Simponik	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan serta melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan	sebagai media pengawasan tidak langsung bagi pelaku usaha dan atau kegiatan. Melaksanakan pemantauan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan secara teratur dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan.	Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Upaya peningkatan kapasitas aparatur di jajaran Dinas Lingkungan Hidup dengan mengikuti bintek, diklat teknis, rapat koordinasi dan sejenisnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas	Menyusun Analisa Kebutuhan Diklat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Pembinaan dan sosialisasi secara intensif tentang pengolahan sampah dari sumbernya dan pemanfaatan lahan untuk tanaman sebagai kawasan produktif.	Pembinaan dan sosialisasi secara intensif tentang pengolahan sampah dari sumbernya diberikan kepada perwakilan pada masing-masing kelurahan di Kota Blitar, yang berupa Program GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Kelola Sampah Kota Blitar) dan	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
		sosialisasi kepada Bank Sampah. Sedangkan sosialisasi dan pembinaan terkait pemanfaatan lahan untuk tanaman sebagai kawasan produktif diberikan kepada kelurahan-kelurahan untuk mendukung Program Kampung Iklim dan Kelurahan Berseri. Serta sosialisasi kepada sekolah untuk mendukung perolehan predikat Adiwiyata.	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
5	Pelibatan masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya mata air	Penanaman bibit penghijauan di sekitar mata air.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
6	Pelaksanaan pengawasan harus melibatkan pejabat fungsional PPLHD, karena tidak adanya PPLHD maka kegiatan lebih difokuskan untuk upaya pemantauan usaha dan/atau kegiatan dengan perbaikan penjadwalan	Mengusulkan kepada BKPSDM memilih pejabat fungsioanal PPLHD sesuai kompetensinya.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. 4.1

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			23,483,822,660							24,924,870,137		
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79 Indeks	7,426,244,761						79 Indeks	7,526,906,843	
2	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen	100 persen	49,871,539						100 persen	45,320,254	
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dokumen	9,828,000	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	5 dokumen	9,926,280	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 laporan	40,043,539	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	2 laporan	35,393,974	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100 persen	6,172,423,568						100 persen	6,335,365,953	
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57 orang/bu lan	6,168,074,018	Kota Blitar, Semua Kecamat an,	Dana Transf er Umum -Dana	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup	Aparatur	57 orang/bu lan	6,291,435,498	Dinas Lingkung an Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas					
												Nasional	Daerah				
									Semua Keluraha n	Alokas i Umum	an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi					
2	1 1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD		4 laporan	4,349,550	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	4 laporan	43,930,455	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100 persen	106,279,100						100 persen	108,404,682	
2	1 1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	68,100,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	3 Paket	69,462,000	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		69 Orang	38,179,100	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	69 Orang	38,942,682	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100 persen	369,893,769						100 persen	373,039,820	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,720,299	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	1 Paket	5,777,502	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	51,109,453	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	6 Paket	51,620,548	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	6,446,318	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	4 Paket	6,510,781	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20 Paket	63,772,000	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	20 Paket	63,605,160	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	25,167,299	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	1 Paket	25,670,645	Dinas Lingkung an Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semua Keluraha n	Alokas i Umum	an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi				
2	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		36 dokumen	7,680,000	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	36 dokumen	7,756,800	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	209,998,400	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	50 laporan	212,098,384	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen	100 persen	132,455,737						100 persen	63,822,183	
2	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 Unit	14,369,563	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	6 Unit	14,513,259	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	118,086,174	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua	Dana Transf er Umum -Dana Alokas	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan	Aparatur	7 Unit	49,308,924	Dinas Lingkung an Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas						
												Nasional		Daerah				
										Keluraha n	i Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi					
2	1	1	2.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	persen	100 persen	330,798,151						100 persen	334,106,133	
2	1	1	2.0	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	65,598,151	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	36 Laporan	66,254,133	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		26 Laporan	265,200,000	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	26 Laporan	267,852,000	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	persen	100 persen	264,522,897						100 persen	266,847,818	
2	1	1	2.0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		39 Unit	131,149,500	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	39 Unit	132,460,995	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0	9	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		69 Unit	5,520,000	Kota Blitar, Semua Kecamat	Dana Transf er Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup,	Peningkat an Kualitas Lingkunga	Aparatur	69 Unit	5,630,400	Dinas Lingkung an Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										an, Semua Keluraha n	-Dana Alokas i Umum	Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi				
2	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		101 Unit	48,983,300	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	101 Unit	49,308,924	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi		1 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	1	2.0 9	1	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi		425 Unit	28,870,097	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Aparatur	425 Unit	29,447,499	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	persen	100 persen	405,141,904						100 persen	572,194,920	
2	1	2	2.0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	dokum en	1 dokumen	147,717,821						1 dokumen	309,694,920	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota												
2	1 1	2	2.0 1	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	147,717,821	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	1 Dokumen	309,694,920	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun	dokum en	2 dokumen	257,424,083						2 dokumen	262,500,000	
2	1 1	2	2.0 2	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		2 Dokumen	257,424,083	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	2 Dokumen	262,500,000	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	persen	7 persen	824,210,967						7 persen	1,025,169,360	
						Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	persen	55 persen							55 persen		
						Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen	100 persen							100 persen		
2	1 1	3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	aksi	3 aksi	824,210,967						3 aksi	1,025,169,360	
						Jumlah kegiatan dampak	kali	3 kali							3 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana		Prioritas				
													Nasional	Daerah			
					pengendalian perubahan iklim												
					Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	titik	18 titik						18 titik				
2	1	3	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 Dokumen	382,841,521	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	2 Dokumen	413,010,736	Dinas Lingkung an Hidup
													Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi				
2	1	3	2.0	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	441,369,446	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	1 Dokumen	612,158,624	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	persen	16,27 persen	2,471,388,917						16,27 persen	2,645,691,571	
2	1	4	2.0		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas RTH Publik yang dikelola	Ha	420.34 Ha	2,471,388,917						420.34 Ha	2,645,691,571	
2	1	4	2.0	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		13 Unit	2,471,388,917	Kota Blitar,	Dana Transf	Membangu n	Peningkat an	Masyara kat	13 Unit	2,645,691,571	Dinas Lingkung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Nasional	Daerah																
					Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	er Umum -Dana Alokasi Umum	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi			an Hidup	
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	persen	100 persen	13,968,612						100 persen	14,247,984	
2	11	5	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	usaha kegiatan	40 usaha kegiatan	13,968,612						40 usaha kegiatan	14,247,984	
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 Dokumen	13,968,612	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen	14,247,984	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	persen	64 persen	192,214,694						64 persen	194,136,841	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
2	1	6	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	usaha	60 usaha	192,214,694					60 usaha	194,136,841		
2	1	6	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		12 Dokumen	69,403,663	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	12 Dokumen	70,097,700	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	6	2.0	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		60 Laporan	122,811,031	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	60 Laporan	124,039,141	Dinas Lingkung an Hidup
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	persen	100 persen	404,964,499					100 persen	655,703,898		
2	1	8	2.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	kelomp ok	21 kelompok	404,964,499					21 kelompok	655,703,898		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
					Kabupaten/Kota												
2	1 1	8	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institus i yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		14 Lembaga	281,038,762	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatkan an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	14 Lembaga	393,915,067	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	8	2.0 1	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		3 Dokumen	123,925,737	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatkan an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	3 Dokumen	261,788,831	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	kali	1 kali	383,545,190						1 kali	387,421,042	
						Persentase kelurahan berseri	persen	47,62 persen							47,62 persen		
						Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	persen	24,03 persen							24,03 persen		
2	1 1	9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	predika t	56 predikat	383,545,190						56 predikat	387,421,042	
						Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	predika t	16 predikat							16 predikat		
2	1 1	9	2.0 1	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrop i dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		5 Entitas	383,545,190	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatkan an Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan	Masyara kat	5 Entitas	387,421,042	Dinas Lingkung an Hidup

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah					
2	1	1	0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	100 persen	16,540,856				Iklim	Ekonomi		100 persen	16,706,265	
2	1	1	0	2.0	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	kasus aduan	2 kasus aduan	16,540,856							2 kasus aduan	16,706,265	
2	1	1	0	2.0	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		1 Dokumen	16,540,856	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	1 Dokumen	16,706,265	Dinas Lingkung an Hidup	
2	1	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	persen	83,10 persen	11,345,602, 260							83,10 persen	11,886,691, 413	
							Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	persen	11,89 persen								11,89 persen		
2	1	1	1	2.0	1	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	ton	22666.52 to n	11,345,602, 260							22666.52 to n	11,886,691, 413	
							Volume sampah yang berkurang	ton	3386.95 ton								3386.95 ton		
2	1	1	1	2.0	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		1 Dokumen	7,291,360	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	1 Dokumen	7,364,274	Dinas Lingkung an Hidup	
2	1	1	1	2.0	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA		26053.47 To n	6,659,328,0 00	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua	Dana Transf er Umum -Dana Alokas	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan	Masyara kat	26053.47 To n	6,725,921,2 80	Dinas Lingkung an Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
					Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				Keluraha n	i Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi				
2	1 1	1 1	2.0 1	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		3 Kelompok	494,873,186	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	3 Kelompok	676,251,010	Dinas Lingkung an Hidup
2	1 1	1 1	2.0 1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		11 Unit	4,184,109,7 14	Kota Blitar, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum	Membangu n Lingkunga n Hidup, Meningkatk an Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkat an Kualitas Lingkunga n Hidup dan Infrastruk tur Pelayanan Dasar dan Ekonomi	Masyara kat	11 Unit	4,477,154,8 49	Dinas Lingkung an Hidup

BAB V

PENUTUP

1.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

1.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

- a. Renja tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) tahun 2023.
- b. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renja tahun 2023 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Blitar.
- d. Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2023 terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka akan dilakukan penyesuaian.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DLH Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance*.